

Pejabat DKI Input Dana Siluman Rp 2 Triliun

JAKARTA, TEROPONG - GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, tidak akan memberi toleransi anak buahnya yang terbukti bermain-main dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jika ada PNS yang nyata-nyata mengakali anggaran, dia mengancam bawahannya itu tidak hanya distafkan, namun juga dinonaktifkan. "Jadi dari Rp.12,1 triliun ternyata ada Rp.2 triliun yang udah masuk di RAPBD 2015. Saya lagi nyisir. Begitu ketahuan siapa yang tanggung jawab, SKPD mana akan langsung saya tindak", ujar Basuki (18/3). Sehingga, masyarakat bisa mengetahui anggaran-anggaran yang janggal dalam APBD DKI Jakarta 2015.

Basuki pun tak segan-segan akan menonaktifkan PNS yang terbukti masih bermain anggaran. "Kita stafkan atau non-aktifkan. Ada macam-macam di anggaran APBD 2015 sebesar Rp.2 triliun itu. Pemeliharaan, UPS juga ada", ungkapny.

Basuki juga mengaku, sudah meminta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit anggaran yang diajukan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. "Kami pengen tahu siapa saja yang nyuruh masukan input (anggaran titipan). Dulu kan mereka (Pemprov KI dan DPRD) tidak pernah mau jawab pertanyaan saya tuh, soal siapa yang hilangin anggaran truk sampah. Semua orang bilang tidak tahu", cetusnya.

Dengan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat DKI terkait penginputan anggaran siluman Rp.2 triliun pada APBD DKI 2015 dalam e-Budgeting,

Basuki mengaku akan ketahuan. "Pasti ketahuan siapa yang nyuruh (memasukkan input data anggaran titipan)?, siapa yang ngetik anggaran? Sudah ketahuan semua", lanjut Basuki. Menindaklanjuti perintah Basuki, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta langsung melakukan pemeriksaan serta audit terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Selasa (17/3). Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa mantan pegawai Bappeda DKI yang diduga memasukkan input data serta meloloskan anggaran 'siluman'.

Pegawai tersebut berinisial 'WW', itu sebelumnya menjabat Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Bappeda DKI saat dipimpin oleh Sarwo Handayani dan Andi Baso Mappapoleonro. kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun menegaskan, pihaknya terus melakukan investigasi terkait dugaan adanya PNS yang terlibat permainan anggaran. Hasilnya, segera dilaporkan kepada Gubernur untuk dilanjutkan mengambil keputusan selanjutnya. "Kita terus lakukan pemeriksaan", tandasnya.

(muller/kardi)



Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)



Lasro Marbun